



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

2025

RENCANA KERJA (RENJA)



Jalan Merdeka No. 06 Telp (0567) 21131
Putussibau

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Rencana Kerja yang telah disusun ini sebagai acuan atau bingkai dari rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak terlepas dari RENSTRA Tahun 2021 – 2026 untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kedepan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tahun 2025 merupakan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 73 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini telah mengkomodir Program Prioritas Nasional Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan juga merujuk kepada Renstra DPMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2025, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2025 DPMD Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disertai dengan adanya Penguatan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hal ini mengingat luasnya pelayanan yang diberikan serta kompleksitasnya yang ada di desa (278 Desa) serta pelaksanaan UU

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan segala aturan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 5 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kapuas Hulu



RUPINUS, S.Sos , M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sitematika	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat daerah	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD.....	62
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1 Penutup.....	64

DAFTAR TABEL

2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2021-2022	7
2.1.2	Program dan Kegiatan DPMD Tahun 2021	14
2.1.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas PMD Tahun Anggaran 2021	16
2.1.4	Pengukuran Kinerja DPMD Th 2021.....	19
2.3.1	Pencapaian Indikator kinerja Utama Th 2021	25
2.3.2	Gambaran keterkaitan antara permasalahan utama Pem kab. KH dengan Permasalahan pokok DPMD.....	26
2.4.1	Matrik Rencana Kerja sebelum dan sesudah perubahan beserta pendanaan DPMD Th 2021	30
2.5.1	Usulan Program dan kegiatan Th 2025	39
3.3.1	Rumusan Rencana Program dan Keg. Th 2025 dan Prakiraan Maju Th 2025.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan dalam pelaksanaan RENSTRA Tahun 2021-2026 untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Penyusunan Renja Tahun 2025 tentunya tidak terlepas dari hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA tahun sebelumnya (2016-2021) yang diawali dari pengamatan lapangan pengkajian data dan informasi dalam pelaksanaan program/kegiatan selama ini baik pelaksanaan program nasional urusan wajib pemerintahan daerah maupun program prioritas utama SKPD yang bersangkutan.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025 selain berorientasi pada tupoksi Dinas juga berorientasi pada keberlanjutan dari hasil yang telah dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan Renstra 2016-2021 dengan lebih mengoptimalkan hasil yang telah dicapai selama ini.

Renja OPD merupakan bagian dari dokumen strategis pelaksanaan perencanaan untuk periode satu tahun, yang akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (RKPD) Tahun 2025 memuat tentang kebijakan program/kegiatan prioritas pembangunan pemberdayaan baik dilaksanakan langsung oleh DPMD Kabupaten Kapuas Hulu maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Instrumen kebijakan yang telah tertuang didalam Renja Tahun 2025 ini pada dasarnya bertujuan mengarahkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan agar mencapai sasaran yang diinginkan sejalan dengan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dari aspek perencanaan yang diarahkan semaksimal mungkin agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan datang dalam rangka implementasi RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025.

Renja OPD ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu program/kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja ini diharapkan mampu merespon kebutuhan masyarakat dan pemerintahan desa kedepannya

dalam bingkai sebuah konsep **“Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”**.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD DPMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 ini, dilandaskan pada peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
21. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud Dan Tujuan dari Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau bingkai dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2025 sebagai bentuk

penjabaran lebih luas dari konsep Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, dengan harapan program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran yang bermanfaat, guna meningkatkan taraf hidup kelompok sasaran itu sendiri serta dapat menumbuhkan Sumber Daya Manusia yang kreatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMD

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Tungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

- 4.1. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang diuraikan dalam lampiran 2.1 Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja OPD dan capaian Renstra OPD. Selain itu, salah satu target kinerja yang di gunakan dalam mengukur keberhasilan program dan kegiatan adalah prosentase capaian atau realisasi APBD diakhir tahun anggaran. Program dan Kegiatan berdasarkan Capaian atau Realisasi APBD tiap Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

Matrik Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d Tahun 2023	
									Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)	Realisasi Renja Peragat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
2	13	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
2	13	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 11,321,600	Rp 8,224,000	Rp 6,588,000	Rp 6,588,000	100%	Rp 4,728,270	Rp 19,540,270	1.7
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 10,947,000	Rp 5,808,800	Rp 2,759,000	Rp 2,759,000	100%	Rp 4,242,615	Rp 12,810,415	1.2
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 12,591,400	Rp -	Rp 6,530,500	Rp 6,530,500	100%	Rp 5,355,595	Rp 11,886,095	0.9
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 10,549,000	Rp 5,549,000	Rp 5,026,000	Rp 5,026,000	100%	Rp 6,313,950	Rp 16,888,950	1.6
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Rp 11,499,000	Rp -	Rp 7,512,500	Rp 7,512,500	100%	Rp 27,943,270	Rp 35,455,770	3.1

						SKPD									
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 7,179,600	Rp 6,722,400	Rp 10,411,000	Rp 10,411,000	100%	Rp 5,765,690	Rp 22,899,090	3.2	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 15,261,300	Rp -	Rp 27,932,400	Rp 26,996,700	97%	Rp 13,732,980	Rp 40,729,680	2.7	
2	13	01	2.02		Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,580,637,075	Rp 3,265,185,030	Rp3,512,625,469	Rp 3,224,947,708	92%	Rp 3,266,136,950	Rp 9,756,269,688	2.7	
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 270,287,000	Rp 209,546,000	Rp 213,580,000	Rp 212,853,100	100%	Rp 216,631,200	Rp 639,030,300	2.4	
2	13	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 11,000,000	Rp 2,900,000	Rp 16,832,000	Rp 15,993,800	95%	Rp 15,563,920	Rp 34,457,720	3.1	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 20,000,000	Rp 9,166,000	Rp 8,179,000	Rp 8,179,000	100%	Rp 5,398,350	Rp 22,743,350	1.1	
2	13	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp 10,000,000		Rp 9,170,000	Rp 9,170,000	100%	Rp 4,909,670	Rp 16,184,480	1.6	
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 9,338,000	Rp 7,706,000	Rp 8,870,000	Rp 8,870,000	100%	Rp 7,014,480	Rp 23,590,480	2.5	
2	13	01	2.03		Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah										
2	13	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 2,464,000		Rp 2,464,000	Rp 2,464,000	100%	Rp 2,445,120	Rp 4,909,120	2.0	
2	13	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1,593,000		Rp 1,110,000	Rp 1,110,000	100%	Rp 1,584,410	Rp 2,694,410	1.7	
2	13	01	2.03	03	koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik	Rp 1,500,000		Rp 1,258,000	Rp 1,258,000	100%	Rp 1,469,640	Rp 2,727,640	1.8	

						Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD										
2	13	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1,663,000		Rp 1,731,000	Rp 1,731,000	100%	Rp 1,681,650	Rp 3,412,650	2.1		
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1,343,000		Rp 1,601,000	Rp 1,601,000	100%	Rp 3,177,780	Rp 4,778,780	3.6		
2	13	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 2,072,500		Rp 1,358,000	Rp 1,358,000	100%		Rp 1,358,000	0.7		
2	13	01			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
2	13	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 470,726,000	Rp 524,100,400	Rp 1,674,000	Rp 1,674,000	100%	Rp 1,674,000	Rp 551,935,230	1.2		
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Rp 50,000,000	Rp 17,519,000	Rp 26,501,000	Rp 26,160,830	99%	Rp 31,100,000	Rp 48,619,000	1.0		
2	13	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah											
2	13	01	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 3,324,000						Rp -	0.0		
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Rp 9,186,000	Rp 3,106,100	Rp 11,673,000	Rp 11,673,800	100%	Rp 11,673,800	Rp 26,453,700	2.9		
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 36,661,000	Rp 23,176,400	Rp 11,785,000	Rp 11,700,000	99%	Rp 11,700,000	Rp 46,576,400	1.3		
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan langganan	Rp 3,420,000						Rp 18,960,000	5.5		
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 73,440,000	Rp 6,000,000	Rp 18,960,000	Rp 18,960,000	100%	Rp 18,960,000	Rp 534,901,674	7.3		
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 550,000,000	Rp 350,010,783	Rp 509,941,700	Rp 509,941,674	100%	Rp 395,760,000	Rp 754,483,783	1.4		
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 13,354,200	Rp 11,200,000	Rp 8,713,000	Rp 8,713,000	100%	Rp 8,713,000	Rp 66,713,000	5.0		
2	13	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Rp 12,600,000	Rp 41,600,000	Rp 46,800,000	Rp 46,800,000	100%	Rp 42,600,000	Rp 84,200,000	6.7		

						Elektronik pada SKPD										
2	13	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp 27,000,000								Rp -	0.0
2	13	01	2.07	06	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp 121,763,300	Rp 15,999,540	Rp 66,248,000	Rp 66,190,000	100%	Rp 62,798,800	Rp 144,988,340		1.2	
2	13	01	2.08		Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	13	01	2.08	01	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 27,000,000		Rp 6,180,000	Rp 6,180,000	100%	Rp 6,180,000	Rp 12,360,000		0.5	
2	13	01	2.08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 79,200,000	Rp 53,615,000	Rp 53,254,129	Rp 51,626,022	97%	Rp 79,200,000	Rp 184,441,022		2.3	
2	13	01	2.08	04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 241,250,000	Rp 224,267,260	Rp 743,156,430	Rp 742,751,040	100%	Rp 716,674,440	Rp 1,683,692,740		7.0	
2	13	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp 109,959,150	Rp 106,298,850	Rp 148,939,300	Rp 148,939,300	100%	Rp 82,596,400	Rp 337,834,550		3.1	
2	13	02			Program : Penataan Desa											
2	13	02	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa											
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Rp 2,990,000,000	Rp 3,221,894,557	Rp 490,000,000	Rp 479,158,000	98%	Rp 351,000,000	Rp 4,052,052,557		1.4	
2	13	03			Program : Peingkatan Kerjasama Desa											
2	13	03	2.01		Kegiatan : fasilitasi kerjasama antar desa											
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp 300,000,000	Rp 64,973,000	Rp 62,644,000	Rp 62,644,000	100%	Rp 65,194,000	Rp 192,811,000		0.6	

2	13	04			Program : Administrasi Pemerintahan Desa									
2	13	04	2.01		Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi									
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 547,620,000		Rp86,324,000.00	Rp 86,324,000.00	100%		Rp 86,324,000	0.2
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 3,402,852,882	Rp 274,205,000	Rp 282,871,000	Rp 282,667,000	100%	Rp 165,366,920	Rp 722,238,920	0.2
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Rp 106,798,000	Rp 109,718,000	Rp90,298,000.00	Rp 90,298,000.00	100%	Rp 46,785,000	Rp 246,801,000	2.3
2	13	04	2.01	010	penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kades	Jumlah Desa yang Melakukan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Rp 200,000,000	Rp 460,390,310					Rp 460,390,310	2.3
2	13	04	2.01	011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Rp 85,479,000	Rp 18,129,000	Rp 33,003,000	Rp 33,003,000	100%	Rp 22,260,000	Rp 73,392,000	0.9
2	13	04	2.01	013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp 191,601,100	Rp 59,749,800	Rp 47,476,000	Rp 47,476,000	100%	Rp 40,300,000	Rp 147,525,800	0.8
2	13	04	2.01	014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Rp 87,366,000					Rp 39,769,000	Rp 39,769,000	0.5
2	13	04	2.01	015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Rp 99,514,000	Rp 26,693,000	Rp27,450,000.00	Rp 27,450,000.00	100%	Rp 37,669,500	Rp 91,812,500	0.9
2	13	04	2.01	018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 72,920,000		Rp82,647,000.00	Rp 82,647,500.00	100%	Rp 36,690,000	Rp 119,337,500	1.6
2	13	05			Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat									
2	13	05	2.01		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota									

2	13	05	2.01	01	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						Rp 30,000,000		
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Jumlah Lembaga Adat	Rp 431,394,000	Rp 378,551,000	378,551,000	Rp 375,271,000.00	100%	Rp 380,974,000	Rp 1,134,796,000	2.6
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp 180,501,800	Rp 64,737,000	Rp 60,077,000	Rp 56,766,400	94%	Rp 63,682,000	Rp 185,185,400	1.0
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp 2,000,000,000	Rp 2,897,300,000	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000	100%	Rp 3,500,000,000	Rp 8,897,300,000	4.4
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 200,000,000	Rp 88,240,000	Rp 69,756,000	Rp 69,756,000	100%	Rp 45,076,000	Rp 203,072,000	1.0

Tabel 2.1.2
Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Tahun 2023

NO	Program	Kegiatan
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Kegiatan : Adminiatrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
2		Pengamanan Barang Milik Daerah
3		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
5		Penataushaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3		Fasilitasi Kunjungan Tamu
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1		Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1		Penyelesaian Jasa Surat Menyurat
2		Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3		Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Program : Penataan Desa	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	
1		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
	Program : Peningkatan Kerjasama Desa	
	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	
1		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa	
	Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	
1		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa
2		Fasilitasi pengelolaan keuangan desa
3		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

5		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
6		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota	
1		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)
2		Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
3		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
4		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan

Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 di rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3
Anggaran dan Realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023

NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6,588,000	Rp 6,588,000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2,759,000	Rp 2,759,000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6,530,500	Rp 6,530,500	100

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 5,026,000	Rp 5,026,000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 7,512,500	Rp 7,512,500	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 10,411,000	Rp 10,411,000	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 27,932,400	Rp 26,996,700	97
	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah			
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3,512,625,469	Rp 3,224,947,708	92
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 213,580,000	Rp 212,853,100	100
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 16,832,000	Rp 15,993,800	95
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 8,179,000	Rp 8,179,000	100
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 9,170,000	Rp 9,170,000	100
	Kegiatan : Administrasi Baran Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 2,464,000	Rp 2,464,000	100
14	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 1,110,000	Rp 1,110,000	100
15	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1,258,000	Rp 1,258,000	100
16	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rp 1,731,000	Rp 1,731,000	100
17	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1,601,000	Rp 1,601,000	100
18	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 1,358,000	Rp 1,358,000	100
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100
19	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 1,674,000	Rp 1,674,000	100
20	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 26,501,000	Rp 26,160,830	99
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 11,673,000	Rp 11,673,800	100
22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11,785,000	Rp 11,700,000	99
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 18,960,000	Rp 18,960,000	100
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 509,941,700	Rp 509,941,674	100
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 8,713,000	Rp 8,713,000	100
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Rp 46,800,000	Rp 46,800,000	100

	SKPD			
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
27	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 66,248,000	Rp 66,190,000	100
	Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyedia jasa surat menyurat	Rp 6,180,000	Rp 6,180,000	100
28	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 53,254,129	Rp 51,626,022	97
29	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 743,156,430	Rp 742,751,040	100
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 148,939,300	Rp 148,939,300	100
	Program : Penataan Desa			
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa			
31	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	Rp 490,000,000	Rp 479,158,000	98
	Program : Peningkatan Kerjasama Desa			
	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Anatar Desa			
31	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)	Rp 62,644,000	Rp 62,644,000	100
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa			
	Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi			
32	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Rp 86,324,000.00	Rp 86,324,000.00	100
33	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp 282,871,000	Rp 282,667,000	100
34	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Rp 90,298,000.00	Rp 90,298,000.00	100
35	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Rp 33,003,000	Rp 33,003,000	100

36	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Rp 47,476,000	Rp 47,476,000	100
37	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 27,450,000.00	Rp 27,450,000.00	100
	Terlaksana Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Rp 82,647,000.00	Rp 82,647,500.00	100
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota			
38	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	Rp 375,551,000.00	Rp 375,271,000.00	100
39	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Rp 60,077,500	Rp 56,766,400	94
40	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Rp 2,500,000,000	Rp 2,500,000,000	100
41	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 69,756,000	Rp 69,756,000	100
Jumlah		Rp 9.707.463.028	Rp 9,400,129,874	96,83

Tabel 2.1.4
Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Sasaran Indikator	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase (%)
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Perkembangan Desa Cepat Berkembang	42,40%	39,7%	93,63%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat SAKIP	BB	B	B

Dari tabel 2.1.3 diatas dapat di ketahui bahwa secara keseluruhan program dan kegiatan yang telah di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2023 berupa capaian 81 - 100 % berdasarkan standar penilaian kinerja terhadap realisasi anggaran dari kegiatan diatas dapat di nilai dengan penilaian berikut ini :

1. Kegiatan dengan realisalsi anggaran yang mencapai 86% - 257% dikategorikan berhasil / tercapai. Kegiatan yang telah direncanakan pada umumnya dapat merealisasikan anggaran dengan sebaik-baiknya.
2. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang mencapai lebih kecil dari 85% dan dikategorikan tidak tercapai.

Dalam sub Bab ini Juga dilampirkan Tabel 2.1.3 tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Tahun 2020 -2025 (Tahun Berjalan)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Masing - masing misi yang diemban dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tujuan berkaitan dengan upaya melaksanakan harapan - harapan yang tersirat dalam visi. Ada pun tujuan tersebut memberikan arah yang lebih jelas agar perbaikan-perbaikan harapan yang ingin di capai lebih terfokus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satu penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Desa memiliki tugas mendukung Visi Pemerintah Daerah tertuang dalam Renstra 2021 - 2026 yaitu ,*" Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil "*.

Dimana hasil dari penjabaran visi yang merupakan misi Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktifitas Ekonomi yang Adil dan Pro Rakyat, Serta Ramah investasi.

Strategi Organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan sebuah rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan

secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka strategi yang di tetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a. Adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan di desa
- c. Adanya peningkatan pembangunan infrastruktur desa melalui gotong royong masyarakat.
- d. Adanya peningkatan pemahaman kelembagaan desa dalam menyelesaikan batas desa
- e. Adanya peningkatan kemampuan dan pengetahuan desa Dalam pendayagunaan teknologi tepat guna menunjang perekonomian masyarakat setempat.
- f. Adanya peningkatan masyarakat desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang efektif dan efesien.
- g. Adanya peningkatan percepatan penyelesaian Adminitrasi Profil Desa.
- h. Adanya peningkatan fungsi BUMDes yang telah terbentuk.
- i. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang BUMDes.
- j. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- k. Adanya Peningkatan peran wanita didalam membantu penambah /penunjang penghasilan keluarga.

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dalam:

1. Perumusan Kebijakan teknis pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Pembinaan dan koordinasi dengan instansi/Lembaga lain terkait di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Pengawasan dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang masyarakat dan desa; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang di serahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu disesuaikan pada target yang telah disusun sesuai indikator kinerja utama pada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2021 - 2026, RKPD 2022 serta Renja SKPD 2025. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020-2025.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Desa Cepat Berkembang	45,60%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP DPMD	B

Adapun Isu - isu penting yang merupakan bagian dari masalah tetapi belum menjadi masalah publik, isu berkembang dari orang perorang kemudian dapat berkembang menjadi persoalan orang banyak, dan mulai ramai di perbincangkan baik melalui berbagai media,disinilah letak isu menjadi masalah publik, isu - isu tersebut harus di kelola dengan berbagai kebijakan dan program -program yang mampu meminimalisir terjadinya masalah yang lebih besar.

Oleh karenanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kapuas Hulu melihat dan mengidentifikasi isu-isu yang ada selama ini sebagai isu strategis adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.3.2

Gambaran Keterkaitan Antara Permasalahan Utama Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Permasalahan Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026

No	Masalah Pokok	Masalah utama	Akar masalah
	Rendahnya Jumlah Desa Mandiri	Rendahnya kualitas administrasi keuangan dan aset desa	Masih rendahnya kualitas perencanaan keuangan desa
			Masih rendahnya kualitas penataan asset dan penyusunan profil desa
		Rendahnya kualitas pemerintahan desa, Lembaga kemasyarakatan dan kerjasama desa	Masih rendahnya kualitas kinerja aparatur pemerintah desa
			Masih kurangnya peran Lembaga adat

		Masih kurangnya fasilitasi kerjasama antar desa
	Masih rendahnya kualitas pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa dan pembangunan kawasan dan kerjasama desa	Masih rendahnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
		Masih rendahnya fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa
		Masih rendahnya kualitas penataan desa

Uraian diatas merupakan gambaran masalah yang dialami oleh desa tertinggal dan sangat tertinggal, maka dari itu permasalahan utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yakni: “Belum maksimalnya upaya pengembangan desa cepat berkembang”.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja SKPD

Rencana Kerja adalah Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melalui berbagai kegiatan.

Rancangan Awal dari RENJA 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Meliputi 5 Program 12 Kegiatan dan 41 sub kegiatan Dengan jumlah pagu anggaran Rp 9,707,463,028 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga dua puluh delapan rupiah) Kegiatan yang disusun dari rencana awal Renja 2023 sudah termasuk usulan dari masyarakat melalui Musrenbang baik Tingkat Desa atau Kecamatan, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.4.1
Matrik Rencana Kerja (Renja) Sebelum dan Sesudah Perubahan Beserta Pendanaan
Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan desa
Tahun 2023

NO	RENCANA AWAL RENJA SKPD					SESUDAH PERUBAHAN TAHUN 2023				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2		4	5	6	2		4	5	6
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran	100%		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani adminitrasi perkantoran	100%	
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	3 Dok	Rp 6,588,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 6,588,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 2,759,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 2,759,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 6,530,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 6,530,500
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,026,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 5,026,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 6,342,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 7,512,500
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	9 Dok	Rp 10,411,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	8 Dok	Rp 10,411,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	4 Dok	Rp 27,932,400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 27,932,400

	Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah					Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD Kab. KH			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. KH	Jumlah bulan	420 org/bln	Rp 3,669,988,754	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD Kab. KH	Jumlah bulan	420 org/bln	Rp 3,512,625,469
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Pengelola Keuangan	1 dok	Rp 210,432,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Pengelola Keuangan	1 dok	Rp 213,580,000
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	10 dok	Rp 16,982,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	10 dok	Rp 16,832,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok	Rp 8,179,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dok	Rp 8,179,000
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	15 dok	Rp 9,170,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	15 dok	Rp 9,170,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	30 dok	Rp 13,670,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	30 dok	Rp 8,870,000
	Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah					Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah				
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 2,464,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 2,464,000
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 1,110,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 1,110,000
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	2 Dok	Rp 1,258,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	2 Dok	Rp 1,258,000
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 1,731,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 1,731,000
5	Penataushaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 1,601,000	Penataushaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah Dokumen	1 Dok	Rp 1,601,000

6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 1,358,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	Rp 1,358,000
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kab. KH	Jumlah orang/bulan tenaga honorer	1 Dok	Rp 1,674,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMD Kab. KH	Jumlah orang/bulan tenaga honorer	1 Dok	Rp 1,674,000
2	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. KH	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	4 Org	Rp 26,501,000	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMD Kab. KH	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	4 Org	Rp 31,100,000
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. KH	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	Rp 11,673,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMD Kab. KH	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	Rp 11,673,000
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	2 dokumen	Rp 11,700,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen yang di cetak dan digandakan	2 dokumen	Rp 11,785,000
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. KH	Jumlah tamu	12 bln	Rp 18,960,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMD Kab. KH	Jumlah tamu	12 bln	Rp 18,960,000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	204 kali	Rp 395,760,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	204 kali	Rp 509,941,700
5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen / arsip yang tertata	1 Dok	Rp 8,713,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah dokumen / arsip yang tertata	1 Dok	Rp 8,713,000
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD Kab. KH	Jumlah sistem dan pelayanan elektronik	96 Org/bln	Rp 42,600,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah sistem dan pelayanan elektronik	96 Org/bln	Rp 46,800,000

	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. KH	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	Rp 62,798,800	Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	DPMD Kab. KH	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	Rp 66,248,000
	Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	DPMD Kab. KH	jumlah materai	618	Rp 6,180,000	Penyedia Jasa Surat Menyurat	DPMD Kab. KH	jumlah materai	618	Rp 6,180,000
2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. KH	jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air, listrik	3 layanan	Rp 53,254,129	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD Kab. KH	jumlah bulan layanan komunikasi, sumber daya air, listrik	3 layanan	Rp 79,200,000
3	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD kab. KH	jumlah orang/ bulan tenaga kebersihan	4 Org	Rp 743,156,430	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD kab. KH	jumlah orang/ bulan tenaga kebersihan	4 Org	Rp 716,674,440
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. KH	Jumlah Ketersediaan Pelayanan (BBM, pajak, biaya pemeliharaan)	3 jenis	Rp 81,596,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD Kab. KH	Jumlah Ketersediaan Pelayanan (BBM, pajak, biaya pemeliharaan)	3 Jenis	Rp 148,939,300
	Program : Penataan Desa					Program : Penataan Desa				
	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa					Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa				
1	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi	1 Desa	Rp 150,000,000	Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi	3 Desa	Rp 490,000,000
	Program : Peningkatan Kerjasama Desa					Program : Peningkatan Kerjasama Desa				

	Kegiatan : Fasilitas Kerjasama Antar Desa					Kegiatan : Fasilitas Kerjasama Antar Desa				
1	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD Kab. KH	Jumlah desa yang dibina	25 Desa	Rp 65,194,000	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD Kab. KH	Jumlah desa yang dibina	25 Desa	Rp 62,644,000
	Program : Administrasi Pemerintahan Desa					Program : Administrasi Pemerintahan Desa				
	Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi					Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi				
1	Fasilitas Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang di Fasilitas	278 Desa	Rp 86,747,000	Fasilitas Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang di Fasilitas	278 Desa	Rp 86,324,000
2	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD Kab. KH	Penyusunan Keputusan Bupati Terkait Tim Evaluasi dan Tim Pembina Keuangan Desa	5 SK	Rp 282,871,000	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD Kab. KH	Penyusunan Keputusan Bupati Terkait Tim Evaluasi dan Tim Pembina Keuangan Desa	5 SK	Rp 282,871,000
			Fasilitas Rapat koordinasi, Desa, Kecamatan, dan Tim Pembina keuangan Desa	6 Kali				Fasilitas Rapat koordinasi, Desa, Kecamatan, dan Tim Pembina keuangan Desa	6 Kali	
			Fasilitas Penyusunan APBDes	278 Desa				Fasilitas Penyusunan APBDes	278 Desa	
			Fasilitas Pencairan DD Tahap I	278 Desa				Fasilitas Pencairan DD Tahap I	278 Desa	
			Fasilitas Pencairan DD Tahap II	278 Desa				Fasilitas Pencairan DD Tahap II	278 Desa	
			Fasilitas Pencairan DD Tahap III	225 Desa				Fasilitas Pencairan DD Tahap III	225 Desa	

			Fasilitas Pencairan BLT DD TW I s/d TW 4	1112 Desa				Fasilitas Pencairan BLT DD TW I s/d TW 4	1112 Desa		
			Fasilitas Pencairan ADD tahap I	278 Desa				Fasilitas Pencairan ADD tahap I	278 Desa		
			Fasilitas Pencairan ADD tahap II	278 Desa				Fasilitas Pencairan ADD tahap II	278 Desa		
			Fasilitas Pencairan ADD tahap III	225 Desa				Fasilitas Pencairan ADD tahap III	225 Desa		
			Fasilitas BHPDR tahap I	278 Desa				Fasilitas BHPDR tahap I	278 Desa		
			Fasilitas BHPDR tahap II	278 Desa				Fasilitas BHPDR tahap II	278 Desa		
			Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan Semester	278 Desa				Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan Semester	278 Desa		
			Konsolidasi laporan akhir tahun	278 Desa				Konsolidasi laporan akhir tahun	278 Desa		
			Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBdes	10				Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBdes	10		
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa Yang Terbina	10 Desa	Rp 42,498,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa Yang Terbina	10 Desa	Rp 90,298,000	
4	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Profil Desa	80 Desa	Rp 33,003,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penyusunan Profil Desa	80 Desa	Rp 33,003,000	

5	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang dibangun Tata Kelola Aset Desa	95 Desa	Rp 47,476,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang dibangun Tata Kelola Aset Desa	95 Desa	Rp 47,476,000
6	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang menyelesaikan Batas desa (perbup batas desa)	10 Perbup	Rp 27,450,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang menyelesaikan Batas desa (perbup batas desa)	10 perbup	Rp 27,450,000
7	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangan Desa	278 desa	Rp 72,919,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD Kab. KH	Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangan Desa	278 desa	Rp 82,647,000
	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota					Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota				
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	DPMD Kab. KH	Jumlah Lembaga Adat	59 orang	Rp 378,551,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	DPMD Kab. KH	Jumlah Lembaga Adat	59 orang	Rp 375,551,000
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Bumdes Sehat/Aktif	150 desa	Rp 65,277,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD Kab. KH	Jumlah Bumdes Sehat/Aktif	150 desa	Rp 60,077,500
3	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD Kab. KH	Jumlah Kegiatan Terfasilitasi	2 Desa	Rp 2,000,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	DPMD Kab. KH	Jumlah Kegiatan Terfasilitasi	2 Desa	Rp 2,500,000,000

4	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD Kab. KH	Jumlah Tim yang difasilitasi	53	Rp 6,980,600	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	DPMD Kab. KH	Jumlah Tim yang difasilitasi	53	Rp 69,756,000	
---	---	--------------	------------------------------	----	--------------	---	--------------	------------------------------	----	---------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses usulan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada program yang ada pada RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu .

Untuk mencapai program yang akan dilaksanakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu memperhatikan isu-isu penting menjadi masalah/ persoalan orang banyak.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.1

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA TAHUN 2024**

KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 Orang/bulan
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen
2	13	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan
2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132 Laporan
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen
2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen
2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		

					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
2	13	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Paket
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan

2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
						Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278 Orang
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
						Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Desa
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			

					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58 Lembaga
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen
X					NON URUSAN		
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan
TOTAL							

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 1.2.





Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
- 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Moderasi beragama; dan
- 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Melalui:

- 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.



Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.



Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 - 2025 merupakan penjabaran visi - misi Gubernur yang bersinegi dengan Visi - misi Nasional serta hasil efaluasi terhadap RPJMD pereode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi Visi, Misi, Tujuan, dan program Pemerintah Daerah. Mengacu Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2025 adalah:

" TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBAGNUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN “

Sebagaiman telah dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2018 - 2025, bahwa terdapat 14 misi yang akan di tempuh selama 5 tahun kedepan dalam mencapai visi pembangunan daerah adalah :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur,
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur perbatasan
- c. Mempercepat pemekaran daerah
- d. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance
- e. Memperbaiki tata kelola pemerintahan
- f. Meningkatkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovasi
- g. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi
- h. Mengurangi daerah tertinggal
- i. Mengurangi ketimpangan antar penduduk dan antar wilayah
- j. Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
- k. Memperkuat peran dan fungsi penelitian
- l. Memantapkan ketertiban masyarakat
- m. Mewujudkan Masyarakat yang agamis dan bermoral
- n. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025.

Maksud ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah agar dapat mempertanggung jawabkan kinerja yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Diharapkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 juga agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mampu berkarya dan berkembang dalam rangka peningkata kinerja profesionalnya.

Ada pun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah;

1. Untuk menjabarkan arahan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 - 2026 kedalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Menjabarkan Target Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 – 2026 kedalam tujuan, sasaran, dan program kerja oprasional;
3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, penigkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektifitas pembangunan sumber daya organisasi.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapaiaan tujuan dan sasaran Rencana Kinerja (RENJA) di tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 5 program sebagai berikut :

A. TUJUAN DPMD :

1. Meningkatnya Jumlah Desa dengan IDM Kategori Mandiri
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sasaran DPMD

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada upaya meningkatkan pridikat nilai evaluasi sapk di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Kapuas hulu secara bertahap yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 5 Program yaitu:

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Desa

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Penyediaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyedia Jasa Surat Menyurat
- b. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehab Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain

Program : Penataan Desa

Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan

- a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status
- b. Fasilitasi tata wilayah desa
- c. Fasilitasi penataan kewenangan desa
- d. Fasilitasi penamaan dan kode desa
- e. Fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten/kota
- f. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa

Program : Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama Antar Desa

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten/ kota

- b. Fasilitasi kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/ kota
- c. Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan

Program : Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan : Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- d. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- e. Evaluasi Pengawasan Peraturan Data
- f. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa
- g. Penyelenggaran Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- h. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- i. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- j. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- k. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- l. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- m. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- n. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan

Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

- a. Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat
- b. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)
- c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- d. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- f. Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- g. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- h. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
- i. Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini 3.3.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kab. Kapuas Hulu

Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Tolok Ukur	Target	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.169.479.465,00				9.945.905.950,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.164.095.965,00				9.938.905.950,00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9.164.095.965,00				9.938.905.950,00
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.404.623.545,00				4.544.136.950,00
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.082.370,00				75.000.000,00
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	4.728.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.000.000,00
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.242.615,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00

2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.355.595,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	6.313.950,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.000.000,00	
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	27.943.270,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Laporan	5.765.690,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	6.500.000,00	
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua	3 Laporan	13.732.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	14.500.000,00	

							Kel/Desa						
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.720.692.437,00				3.526.136.950,00
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	360 Orang/bulan	3.471.174.817,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	3.266.136.950,00
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Dokumen	216.631.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	220.000.000,00
2	13	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	10 Dokumen	15.563.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	20.000.000,00
2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.398.350,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.000.000,00
2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								

						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	4.909.670,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	6.000.000,00
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132 Laporan	7.014.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	132 Laporan	8.000.000,00
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.358.600,00				12.500.000,00
2	13	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.445.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.000.000,00
2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.584.410,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00
2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								

					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.469.640,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.000.000,00
2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.681.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000,00
2	13	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	3.177.780,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.500.000,00
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			38.685.460,00				42.500.000,00
2	13	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	6.366.660,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	7.500.000,00
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	32.318.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	35.000.000,00
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			473.848.998,00				518.000.000,00

2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Paket	27.724.998,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	30.000.000,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	11.128.860,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.000.000,00	
2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	12.105.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	14.000.000,00	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	413.946.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	450.000.000,00	
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	8.944.140,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	10.000.000,00	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				118.285.138,00				125.000.000,00
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	118.285.138,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	125.000.000,00
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			786.406.542,00				65.000.000,00
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	58.232.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65.000.000,00
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	728.174.182,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			188.264.000,00				180.000.000,00
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	163.264.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	150.000.000,00
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			351.000.000,00				450.000.000,00

2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			351.000.000,00					450.000.000,00
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa								
					Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	351.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 Unit		450.000.000,00
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			388.840.420,00					389.769.000,00
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			388.840.420,00					389.769.000,00
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa								
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	165.366.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen		200.000.000,00
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa								
					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	46.785.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	10 Orang		0,00
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa								
					Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	22.260.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	4 Dokumen		25.000.000,00
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	40.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	4 Dokumen		39.769.000,00
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD								

					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278 Orang	39.769.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	278 Orang	45.000.000,00
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa							
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Desa	37.669.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	40.000.000,00
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	36.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen	40.000.000,00
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			3.019.632.000,00				4.555.000.000,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.019.632.000,00				4.555.000.000,00
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							

						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokumen	35.000.000,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58 Lembaga	380.874.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	58 Lembaga	400.000.000,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	63.682.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen	70.000.000,00
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								

						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	3 Laporan	2.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	4.000.000.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga								
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Dokumen	45.076.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen	50.000.000,00
X					NON URUSAN				5.383.500,00				7.000.000,00
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.383.500,00				7.000.000,00
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.383.500,00				7.000.000,00
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.383.500,00				7.000.000,00
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Laporan	5.383.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.000.000,00
TOTAL									9.169.479.465,00				9.945.905.950,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu 2021 - 2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan - kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menyusun rencana kerja (Renja) tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan tahun 2025. Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan – persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) berupa:

- a. Bagian alur tahapan penyusunan rencana kerja Satuan Perangkat Daerah.
- b. Persiapan penyusunan Renja SKPD
- c. Penyusunan rancangan Renja SKPD
- d. Pelaksanaan Format SKPD
- e. Penetapan Kerja SKPD

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya masing – masing .yang pada hakekatnya mengembangkan tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi , dan fungsi alokasi. Pada dasarnya wujud Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Pendapatan Daerah :

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber pada :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan yang bersumber pada:
 - a. Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapata Daerah yang sah yang bersumber pada :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan Sistem Perencanaan Nasional yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap perkembangan zaman.

Penyusunan Renja tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari rencana kerja DPMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai alat umpan balik (Feed back) yang dapat digunakan manajemen dalam rangka memberikan masukan/pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus pertanggungjawaban atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas dan penjabaran dari Visi dan Misi SKPD.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjuk melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Putussibau, 5 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Kapuas Hulu



RUPHUS, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001